

INDIKATOR STRATEGIS

PROVINSI SUMATERA BARAT

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

INDIKATOR STRATEGIS

PROVINSI SUMATERA BARAT

2017



Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2017

ISBN : 978-602-6544-28-5

No. Publikasi : 13560.1801

Katalog : 1103019.13

Ukuran Buku : 11,5 cm x 6,5 cm

Jumlah Halaman : xii + 116

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kover oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Diterbitkan oleh : © BPS Provinsi Sumatera Barat

Dicetak oleh : CV. Graphic Dwipa (Cetakan : 1)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

Tim Penyusun

Pengarah

Dr. Ir. Sukardi, M.Si.

Editor

1. Ichsan, S.S.T
2. Teguh Sugiyarto, Ph.D.
3. Setio Nugroho, M.A.
4. Hefinanur, S.E., M.E.
5. Faizal A., S.E., M.Si.
6. Dicky Harryadi, S.E., M.E.
7. Sedwivia Ridena, S.S.T.
8. Adek Budiman, S.S.T.
9. M. Kanzu Satrio, S.S.T.
10. Rizka Aulia, S.S.T.
11. Sumi Lestari, S.Si.
12. Didik Darmadi, S.S.T., M.CIO

Penyusun

1. Erna Nurmawati, S.S.T, M.T.
2. Dewi Astuti, S.S.T., M.Stat.
3. Deswaty, S.S.T.



<https://sumber.bar>

KATA PENGANTAR

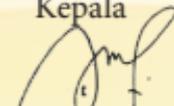
Publikasi Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2017 ini sengaja dibuat dalam format buku saku untuk mempermudah pengguna data dalam mengakses indikator-indikator pokok dan penting Provinsi Sumatera Barat kondisi terkini.

Sebagian besar data dalam publikasi ini merupakan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan survei dan sensus oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, kami harapkan data-data yang telah dihasilkan dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Saran yang konstruktif untuk kemajuan publikasi sejenis pada masa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga bermanfaat.

Padang, Januari 2018
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat

Kepala



SUKARDI



<https://sumber.bar>

DAFTAR ISI

DISTRIBUSI	1
Tabel 1.1. Inflasi Padang, Bukittinggi, Sumbar,dan Indonesia per Bulan 2017	3
Tabel 1.2. Inflasi Padang, Bukittinggi, Sumbar, dan Indonesia 2012-2017	5
Tabel 1.3. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2017 per Bulan	7
Tabel 1.4. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap,dan Jumlah Wisman Sumbar 2011-2017	11
Tabel 1.5. Volume dan Nilai Ekspor Impor 2012-2017	13
Tabel 1.6. Volume dan Nilai Ekspor Impor per Bulan Tahun 2017.....	15
Tabel 1.7. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara 2012-2016	19
Tabel 1.8. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara per Bulan Tahun 2017	21
Tabel 1.9. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian 2013-2017	25

Tabel 1.10. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian per Bulan Tahun 2017.. 26

NERACA.....29

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Sumbar dan Indonesia Tahun 2010-2017 31

Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumbar, dan Kab/Kota se-Sumbar Tahun 2014-2016 33

Tabel 2.3. Kontribusi PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2014-2017 35

Tabel 2.4. Kontribusi PDRB Sumbar menurut Pengeluaran Tahun 2014-2017..... 37

Tabel 2.5. PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 38

Tabel 2.6. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Provinsi Sumatera Barat 2015-2016 41

Tabel 2.7. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016..... 43

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Gender dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015..... 47

Tabel 2.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2015.....	49
---	----

SOSIAL51

Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2011-2017.....	53
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017 (orang)	54
Tabel 3.3. Persentase Kemiskinan Sumbar dan Indonesia Tahun 2012-2017	57
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Miskin Sumbar dan Indonesia Bulan Maret dan September Tahun 2012-2017	59
Tabel 3.5. Garis Kemiskinan Sumbar dan Indonesia, 2012-2017	61
Tabel 3.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sumatera Barat, 2014-2017	63
Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin , P1, P2 dan Garis Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016	64
Tabel 3.8. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Barat, 2011-2017	67

Tabel 3.9. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016	68
Tabel 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumbar dan Indonesia, 2012-2017	71
Tabel 3.11. Persentase Penduduk Bekerja Sumbar dan Indonesia, 2012-2017	72
Tabel 3.12. Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia, 2012-2017	73
Tabel 3.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke-atas Sumbar dan Indonesia, 2012-2017	74
Tabel 3.14. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia (orang), 2012-2017	75
Tabel 3.15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar dan Indonesia, 2012-2017...	77
Tabel 3.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2015 dan 2017	78
Tabel 3.17. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SumateraBarat Tahun 2016 -2017	81
Tabel 3.18. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/Kota SumateraBarat Tahun 2017	83

Tabel 3.19. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2017	85
Tabel 3.20. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016	87
Tabel 3.21. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat, 2009-2016	88
Tabel 3.22. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, 2012-2017.....	89

PRODUKSI **91**

Tabel 4.1. Jumlah Produksi Padi menurut Kab/kota di Sumatera Barat(ton)	93
Tabel 4.2. Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil SE2016 menurut Kategori dan Lokasi Usaha	97
Tabel 4.3. Persentase Jumlah Usaha Hasil SE2016 menurut Kategori	100
Tabel 4.4. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (usaha)	102
Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (orang)	105
Tabel 4.6. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota (usaha)	107

Tabel 4.7. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota di Sumatera Barat (orang)..... 109

IPDS 111

Tabel 5.1. Rekap Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2017 112

Tabel 5.2. Luas Wilayah Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 115



DISTRIBUSI

<http://www.jumbar.biz>

Inflasi:

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga konsumen (IHK):

Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Tabel 1.1. Inflasi Padang, Bukittinggi, Sumbar, dan Indonesia per Bulan 2017

WILAYAH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Padang	0,57	-0,13	-0,01	-0,31	-0,04	0,34	0,54	-0,36	0,13	0,19	0,48	0,72
Bukittinggi	0,22	-0,45	0,25	-0,18	-0,44	0,20	0,09	0,28	0,31	0,41	0,32	0,37
Sumbar	0,53	0,35	0,02	-0,30	-0,09	0,32	0,48	-0,28	0,16	0,22	0,46	0,68
Indonesia	0,97	0,23	-0,02	0,09	0,39	0,69	0,22	-0,07	0,13	0,01	0,20	0,71

- Beberapa komoditas yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
- Untuk beberapa komoditas bahan makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
- Untuk komoditas bahan makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
- Data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
- Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Upah baby sitter dan pembantu rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

Tabel 1.2. Inflasi Padang, Bukittinggi, Sumbar, dan Indonesia 2012-2017

Tahun	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	4,16	-	-	4,30
2013	10,87	-	-	8,38
2014	11,90	9,24	11,58	8,36
2015	0,85	2,79	1,08	3,35
2016	5,02	3,93	4,89	3,02
2017	2,11	1,37	2,02	3,61

Catatan : Pendataan Survei Harga Konsumen (SHK) Kota Bukittinggi baru dimulai tahun 2014

- **Tingkat Penghunian Kamar Hotel**

adalah banyaknya malam kamar yang terjual dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan 100%.

- **Tingkat Penghunian Tempat Tidur**

adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikalikan 100%.

- **Rata-rata Lama Tamu Menginap**

adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap.

Tabel 1.3. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2017 per Bulan

Bulan	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
Jan	40,85	34,55	1,44	1,01	4 020
Feb	47,22	29,81	1,47	1,06	4 045
Mar	55,67	32,42	1,58	1,10	4 989
April	58,78	36,72	1,40	1,24	4 558
Mei	55,28	28,68	1,77	1,10	4 109
Jun	41,05	27,76	1,41	1,17	2 940

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu

1. **Wisatawan** (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
- b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

2. **Pelancong** (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Lanjutan Tabel 1.3.

Bulan	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
Juli	57,31	36,00	1,44	1,23	4 080
Agus	54,86	33,68	1,53	1,36	5 209
Sep	59,27	34,25	1,56	1,25	4 347
Okt	59,64	31,89	1,60	1,21	4 826
Nov	65,05	36,39	1,77	1,29	4 622
Des	64,89	42,02	1,42	1,23	8 568

1. Usaha Akomodasi

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2. Hotel berbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

3. Hotel nonbintang/Melati

adalah usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

4. Pondok Wisata (*Homestay*)

adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

5. Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.

6. Villa

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.

7. Jasa akomodasi jangka pendek lainnya

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk salah satu di atas, misalnya bungalow, cottage, dan lain-lain.

Tabel 1.4. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2011-2017

Tahun	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
2011	48,55	36,99	1,49	1,25	34 522
2012	49,00	35,66	1,40	1,26	36 623
2013	50,22	36,81	1,50	1,28	48 710
2014	48,53	37,18	1,65	1,49	56 111
2015	53,11	36,88	1,56	1,34	48 755
2016	53,27	32,92	1,40	1,18	49 686
2017	54,80*	34,29*	1,53*	1,26*	56 313*

Catatan : *) angka sementara

Perdagangan luar negeri

terdiri dari ekspor dan impor barang-barang

Sumber Data

Data utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.

Metode Pengumpulan

Data diperoleh dari hasil kompilasi dan survei.

Tabel 1.5. Volume dan Nilai Ekspor Impor 2012-2017

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)
2012	3 313	2 364	1 581	1 243
2013	4 596	2 209	1 331	1 035
2014	3 994	2 106	1 444	1 035
2015	3 735	1 748	1 483	633
2016	3 643	1 708	1 016	345
2017	4 723	2 046	1 025	446

Sumber : Laporan Kantor Imigrasi (Pertama Kedatangan)

Perdagangan luar negeri

terdiri dari ekspor dan impor barang-barang

1. Cakupan komoditas

Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk dibawah ini:

- a. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang dan awak alat angkut.
- b. Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
- c. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekshebisi atau pameran.
- d. Peti Kemas yang dimaksudkan untuk diisi kembali.
- e. Uang, surat-surat berharga dan barang finansial lainnya.
- f. Barang-barang contoh.

2. Sistem Perdagangan

- a. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
- b. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum sejak tahun 2008. Sebelum tahun 2008 menggunakan Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai Luar Negeri.

Tabel 1.6. Volume dan Nilai Ekspor Impor per Bulan Tahun 2017

Bulan	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)
Januari	292,11	201,38	79,55	44,85
Februari	464,74	223,49	107,33	44,20
Maret	319,45	179,89	39,30	22,63
April	425,06	221,84	43,47	18,05
Mei	482,74	183,10	133,71	35,79
Juni	465,77	158,63	83,00	38,23

3. Penilaian

- a. Ekspor mengacu pada nilai *Free On Board* (FOB).
- b. Impor mengacu pada nilai *Cost Insurance and Freight* (CIF).
- c. Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika (USD)

4. Pengukuran Kuantitas

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat netto dalam satuan kilogram.

5. Rekan Negara

- a. Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
- b. Negara asal adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

Lanjutan Tabel 1.6.

Bulan	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta USD)
Juli	367,33	107,80	107,36	38,27
Agustus	473,93	184,25	86,54	43,88
September	357,07	125,30	78,83	39,00
Oktober	374,17	162,11	49,12	30,71
November	359,98	165,58	117,70	46,00
Desember	340,34	132,66	98,72	44,63

TRANSPORTASI

Kegiatan-kegiatan ini mencakup 3 jenis transportasi, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Statistik Angkutan Darat berisi informasi statistik semua kendaraan bermotor di Indonesia kecuali kendaraan militer dan diplomatik; Informasi panjang jalan didapat dari kantor pemerintah pusat atau daerah; dan transportasi kereta api mengumpulkan informasi penumpang dan barang di Jawa, Madura dan Sumatera.

Statistik Angkutan Laut memberikan informasi statistik tentang pelabuhan seperti cargo, jumlah keberangkatan dan kedatangan serta trafik kapal.

Statistik Angkutan Udara mencakup jadwal penerbangan dan baik domestik dan Internasional; dan statistik pelabuhan udara baik komersial dan non komersial seluruh Indonesia.

Sumber Data

Statistik Transportasi Darat didasarkan pada data sekunder dari Instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian, Kantor Pemerintah Daerah, PTKA, Perusahaan angkutan penyebrangan.

Statistik Angkutan Laut didapat dari semua pelabuhan laut seluruh Indonesia baik komersial dan non komersial.

Statistik Angkutan Udara terdiri dari data primer yang dikumpulkan oleh BPS melalui survei dan data sekunder yang didapat dari Direktorat Jenderal Transportasi Udara.

Tabel 1.7. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara 2012-2016

Tahun	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
2012	4 689,15	1 196,00	128,54
2013	4 740,05	1 268,88	92,13
2014	4 684,51	1 317,52	95,95
2015	4 289,21	1 439,51	133,53
2016	3 710,42	1 741,39	105,90
2017	4 307,80	1 844,49	115,65

Angkutan Laut

Bongkar/Impor Barang

adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang

adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri.

Pelabuhan

adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Umum

adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

Kantor Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan (KANPEL)

adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel 1.8. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara per Bulan Tahun 2017

Bulan	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
Jan	230,53	151,38	8,94
Feb	306,43	126,27	9,87
Mar	336,49	139,44	8,90
April	281,98	147,20	8,76
Mei	407,10	148,16	8,06
Juni	362,29	117,55	5,35

bersambung...

Pengumpulan Data

Statistik Angkutan Laut

dikumpulkan dengan sensus dari pelabuhan laut komersial dan non komersial seluruh Indonesia.

Statistik Angkutan Udara

Pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran tentang aktifitas angkutan udara antar bandar udara secara nasional dilakukan melalui beberapa cara. Untuk lalu lintas angkutan udara berupa asal tujuan, pergerakan pesawat udara, penumpang, bagasi, barang dan pos/paket dikumpulkan dari bandar udara baik yang dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura maupun Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di daerah yang bersangkutan. Data lalu lintas angkutan udara yang dikumpulkan ini merupakan rekapitulasi terhadap aktivitas penerbangan masing-masing bandar udara setiap bulan. Sedangkan data registrasi pesawat dikumpulkan dari Direktorat Penerbangan Sipil serta data produksi perusahaan penerbangan berjadwal diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan kemudian dilengkapi dengan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Lanjutan Tabel 1.8.

Bulan	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
Juli	297,59	204,03	10,51
Agustus	442,55	155,57	13,42
September	412,64	167,25	8,53
Oktober	402,64	156,84	9,09
November	370,37	153,08	10,72
Desember	457,20	177,74	13,48

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani

NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (I_t) dengan Indeks harga yg dibayar petani (I_b)

Arti Angka NTP :

$NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

$NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

$NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 1.9. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian 2013-2017

TAHUN	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)
2013	104,21	-	104,91	-
2014	100,66	106,34	102,03	106,05
2015	97,74	104,49	101,59	107,44
2016	97,67	107,13	101,65	109,93
2017	96,97	107,97	101,27	110,23

Tabel 1.10. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian per Bulan Tahun 2017

Bulan	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)
Januari	97,92	109,15	100,91	110,24
Februari	98,64	109,72	100,33	109,62
Maret	98,19	109,50	99,95	108,93
April	98,71	108,93	100,01	108,61
Mei	97,07	107,44	100,15	109,15
Juni	96,66	106,34	100,53	109,59

bersambung...

Lanjutan Tabel 1.10.

Bulan	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)
Juli	95,82	105,89	100,65	109,75
Agustus	96,24	107,33	101,60	110,61
September	96,34	107,43	102,22	110,91
Oktober	95,71	107,28	102,78	111,26
November	96,15	108,02	103,07	111,72
Desember	96,24	108,58	103,06	112,40

<https://sumbar.br>



NERACA

<http://sumber.bi>

Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu

- **Produk Domestik Regional Bruto Perkapita** adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.
- **Harga berlaku** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
- **Harga konstan** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Sumbar dan Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		PDRB Perkapita (Juta Rp)	
	Sumbar	Indonesia	Sumbar	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	5,60	6,38	17,93	27,03
2011	6,34	6,17	20,06	30,66
2012	6,31	6,03	26,30	35,11
2013	6,08	5,56	29,00	38,28
2014	5,88	5,01	32,14	41,92
2015	5,52	4,88	34,63	45,14
2016	5,26	5,02	37,35	47,96
2017	5,29	5,07	40,32	51,89

- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga** mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.
- **Pengeluaran konsumsi pemerintah** mencakup pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, penyusutan maupun belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran rutin lainnya), baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- **Pembentukan Modal Tetap Bruto** mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.
- **Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto** diperoleh dari perhitungan PDRB atas harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumbar, dan Kab/ Kota se-Sumbar Tahun 2014-2016

Pertumbuhan Ekonomi	2014	2015	2016
Indonesia	5,01	4,88	5,02
Sumbar	5,88	5,52	5,26
1. Kab. Kep. Mentawai	5,58	5,15	5,01
2. Kab. Pesisir Selatan	5,80	5,73	5,30
3. Kab. Solok	5,79	5,43	5,30
4. Kab. Sijunjung	6,02	5,66	5,25
5. Kab. Tanah Datar	5,78	5,31	5,01
6. Kab. Padang Pariaman	6,05	6,13	5,50
7. Kab. Agam	5,91	5,51	5,40
8. Kab. Lima Puluh Kota	5,97	5,56	5,31

Lanjutan Tabel 2.2.

Pertumbuhan Ekonomi	2014	2015	2016
9. Kab. Pasaman	5,87	5,33	5,06
10. Kab. Solok Selatan	5,90	5,35	5,11
11. Kab. Dharmasraya	6,33	5,80	5,39
12. Kab. Pasaman Barat	6,03	5,70	5,32
13. Kota Padang	6,57	6,35	6,21
14. Kota Solok	6,00	5,95	5,75
15. Kota Sawahlunto	6,01	6,00	5,71
16. Kota Padang Panjang	6,07	5,91	5,79
17. Kota Bukittinggi	6,18	6,12	6,04
18. Kota Payakumbuh	6,47	6,19	6,08
19. Kota Pariaman	5,99	5,78	5,58

Tabel 2.3. Kontribusi PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2014-2017

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,99	24,69	24,02	23,55
2. Pertambangan dan Penggalian	4,88	4,82	4,52	4,26
3. Industri Pengolahan	10,56	10,18	10,08	9,71
4. Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,10	0,11	0,11
5. Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Kontruksi	9,09	9,38	9,27	9,32
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,38	14,61	14,87	15,05

Lanjutan Tabel 2.3.

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017
8. Transportasi dan Pergudangan	11,76	12,23	12,45	12,64
9. Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,22	1,31	1,35
10. Informasi dan Komunikasi	5,13	4,85	4,99	5,28
11. Jasa Keuangan	3,10	3,10	3,17	3,09
12. Real Estate	1,97	2,00	2,00	1,97
13. Jasa Perusahaan	0,42	0,43	0,43	0,43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5,89	5,70	5,82	5,85
15. Jasa Pendidikan	3,62	3,67	3,84	4,13
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,26	1,27	1,33
17. Jasa Lainnya	1,63	1,68	1,77	1,84

Tabel 2.4. Kontribusi PDRB Sumbar menurut Pengeluaran Tahun 2014-2017

JENIS PENGELUARAN	2014	2015	2016	2017
- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,52	53,64	52,84	52,50
- Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1,12	1,11	1,12	1,05
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,11	13,48	13,27	12,68
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30,12	30,52	30,35	29,93
- Perubahan Inventori	0,09	0,33	0,26	0,15
- Ekspor LN	14,14	12,50	10,85	12,62
- Impor LN	8,39	5,49	3,02	3,42
- Net Ekspor Antar Daerah	-3,71	-6,09	-5,67	-5,50
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.5. PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016

Kab/Kota	PDRB ADHB (Miliar)	PDRB ADHB Perkapita (Juta)	PDRB ADHK 2000 (Miliar)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Kepulauan Mentawai	3 721 507,48	42,79	2 607 574,80
02. Kab. Pesisir Selatan	10 685 349,85	23,55	8 230 489,72
03. Kab. Solok	11 046 635,67	30,16	8 510 116,66
04. Kab. Sijunjung	7 721 367,73	34,12	5 827 550,80
05. Kab. Tanah Datar	10 727 031,18	31,03	8 352 686,97
06. Kab. Padang Pariaman	17 521 183,33	42,88	11 693 363,44
07. Kab. Agam	16 520 890,00	34,37	12 552 541,82
08. Kab. Lima Puluh Kota	12 627 317,65	33,89	9 607 406,21
09. Kab. Pasaman	6 995 780,32	25,64	5 341 795,81
10. Kab. Solok Selatan	4 598 324,45	28,26	3 434 743,59
11. Kab. Dharmasraya	8 433 539,85	36,78	6 488 667,14
12. Kab. Pasaman Barat	12 795 020,27	30,55	9 855 119,49

bersambung...

Lanjutan Tabel 2.5

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar)	PDRB ADHB Perkapita (Juta)	PDRB ADHK 2000 (Miliar)
(1)	(2)	(3)	(4)
13. Kota Padang	49 296 193,38	53,88	37 358 319,79
14. Kota Solok	3 238 355,20	48,11	2 440 002,52
15. Kota Sawahlunto	2 938 792,97	48,35	2 380 106,21
16. Kota Padang Panjang	2 773 914,99	53,64	2 185 791,57
17. Kota Bukittinggi	6 749 791,92	54,12	5 168 023,69
18. Kota Payakumbuh	4 983 384,58	38,39	3 766 968,80
19. Kota Pariaman	4 004 359,81	46,73	3 061 858,30
Jumlah	197 378 740,62	37,53	148 863 127,29
Sumatera Barat	195 682 525,01	37,21	148 110 750,47

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Indikator

Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah .
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

**Tabel 2.6. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sumatera Barat 2015-2016**

No.	Indikator	Tahun	
		2015	2016
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,66	68,73
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)/EYS	13,6	13,79
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th+)/EYS	8,42	8,59
4	Pengeluaran Perkapita Setahun yang di Sesuaikan (96 komoditi PPP)	9.803,74 (ribu Rp)	10.126,00 (ribu Rp)
IPM		69,98	70,73

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

**Tabel 2.7. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016**

WILAYAH	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
Sumatera Barat	68,73	13,79	8,59	10 126,00	70,73
1. Kab. Kepulauan Mentawai	64,36	11,74	6,52	5 771,00	58,27
2. Kab. Pesisir Selatan	70,11	13,05	8,12	8 605,00	68,39
3. Kab. Solok	67,50	13,00	7,58	9 664,00	67,67
4. Kab. Sijunjung	65,33	12,27	7,50	9 895,00	66,01
5. Kab. Tanah Datar	68,93	13,46	8,12	10 296,00	70,11
6. Kab. Padang Pariaman	67,80	13,55	7,00	10 455,00	68,44
7. Kab. Agam	71,44	13,73	8,18	9 111,00	70,36
8. Kab. Lima Puluh Kota	69,27	13,25	7,92	8 936,00	68,37
9. Kab. Pasaman	66,40	12,71	7,64	7 678,00	64,57

bersambung...

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Lanjutan Tabel 2.7.

WILAYAH	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
10. Kab. Solok Selatan	66,78	12,51	7,99	9 802,00	67,47
11. Kab. Dharmasraya	70,30	12,39	8,23	10 781,00	70,25
12. Kab. Pasaman Barat	67,09	12,67	7,84	8 393,00	66,03
13. Kota Padang	73,19	15,87	11,24	13 721,00	81,06
14. Kota Solok	72,83	14,28	10,79	11 519,00	77,07
15. Kota Sawah Lunto	69,33	13,05	9,92	9 051,00	70,67
16. Kota Padang Panjang	72,45	15,02	11,42	9 804,00	76,50
17. Kota Bukit Tinggi	73,60	14,93	10,98	12 475,00	79,11
18. Kota Payakumbuh	73,03	14,22	10,30	12 705,00	77,56
19. Kota Pariaman	69,63	14,50	10,09	12 141,00	75,44

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender dan lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Gender dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	IPG
(1)	(2)
01. Kab. Kep. Mentawai	89,31
02. Kab. Pesisir Selatan	95,23
03. Kab. Solok	95,73
04. Kab. Sijunjung	92,34
05. Kab. Tanah Datar	98,44
06. Kab. Padang Pariaman	93,15
07. Kab. Agam	97,04
08. Kab. Lima Puluh Kota	95,50
09. Kab. Pasaman	92,95
10. Kab. Solok Selatan	95,33
11. Kab. Dharmasraya	88,29
12. Kab. Pasaman Barat	88,44

Lanjutan Tabel 2.8.

Kabupaten/Kota	IPG
(1)	(2)
13. Kota Padang	93,77
14. Kota Solok	96,62
15. Kota Sawahlunto	95,52
16. Kota Padang Panjang	98,56
17. Kota Bukittinggi	99,75
18. Kota Payakumbuh	98,52
19. Kota Pariaman	98,72
Sumatera Barat	94,74

Tabel 2.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan Diparlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kab. Kep. Mentawai	0,01	41,35	30,59	46,47
02. Kab. Pesisir Selatan	4,44	56,10	33,94	54,92
03. Kab. Solok	8,57	59,73	38,73	61,54
04. Kab. Sijunjung	10,00	61,17	28,06	56,21
05. Kab. Tanah Datar	8,57	53,01	33,15	58,95
06. Kab. Padang Pariaman	5,00	43,09	31,07	53,26
07. Kab. Agam	2,27	58,46	38,47	54,35
08. Kab. Lima Puluh Kota	8,57	64,82	27,67	51,68
09. Kab. Pasaman	5,71	57,50	38,48	59,70
10. Kab. Solok Selatan	0,01	59,02	36,47	49,59
11. Kab. Dharmasraya	4,00	61,04	26,55	47,47
12. Kab. Pasaman Barat	2,50	58,60	36,35	53,57

Lanjutan Tabel 2.9.

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Kota Padang	15,56	56,21	34,23	68,31
14. Kota Solok	5,00	53,92	35,92	57,60
15. Kota Sawahlunto	20,00	59,27	27,59	64,59
16. Kota Padang Panjang	20,00	67,17	46,60	73,30
17. Kota Bukittinggi	8,00	61,14	37,02	60,83
18. Kota Payakumbuh	8,00	57,33	37,82	61,70
19. Kota Pariaman	5,00	56,42	30,73	52,89
Sumatera Barat	9,23	56,75	36,40	62,42



SOSIAL

Penduduk

adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Data yang digunakan BPS saat ini adalah Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035.

Sensus Penduduk

Informasi yang biasa dikumpulkan dengan penghitungan lengkap misalnya nama, jenis kelamin dan umur, sedangkan informasi yang lebih detail seperti hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, kelahiran, perpindahan, dan informasi tentang kondisi rumah dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel.

Survei Penduduk Antar Sensus

Informasi yang dikumpulkan dari survei ini sebagian besar adalah sama dengan yang dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel dari sensus penduduk menyangkut kelahiran dan kematian.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Dalam dua survei ini, informasi tentang kelahiran, kematian, kesehatan dan keluarga berencana adalah yang paling utama diperhatikan. Dengan memperhatikan kelahiran, survei ini mengumpulkan informasi tentang latar belakang responden, sejarah kelahiran, preferensi kelahiran, pemberian ASI, pengetahuan dan praktek dari keluarga berencana, dan pekerjaan responden.

Registrasi Penduduk

Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti kelahiran, kematian dan migrasi, yang dialami oleh individu tertentu atau rumah tangga dan dilaporkan pada perangkat desa.

Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2011-2017

Tahun	Penduduk (ribu orang)			Sex Ratio	Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	2.445	2.488	4.933	98,29	1,39
2012	2.481	2.519	5.000	98,48	1,36
2013	2.516	2.551	5.067	98,64	1,33
2014	2.550	2.581	5.132	98,80	1,29
2015	2.584	2.612	5.196	98,93	1,26
2016	2.617	2.642	5.260	99,05	1,22
2017	2.649	2.671	5.320	99,17	1,14

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017
(orang)**

Kab./Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
01. Kep. Mentawai	46 118	42 574	88 692
02. Pesisir Selatan	226 783	230 502	457 285
03. Kab. Solok	182 274	186 417	368 691
04. Sijunjung	115 175	114 929	230 104
05. Tanah Datar	169 417	177 161	346 578
06. Padang Pariaman	202 400	208 603	411 003
07. A g a m	238 326	245 962	484 288
08. Lima Puluh Kota	186 821	189 251	376 072
09. P a s a m a n	136 803	138 925	275 728
10. Solok Selatan	83 605	81 998	165 603
11. Dharmasraya	122 116	113 360	235 476
12. Pasaman Barat	216 093	211 202	427 295

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.2

Kab./Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
13. Padang	463 116	463 895	927 011
14. Kota Solok	33 994	34 608	68 602
15. Sawahlunto	30 486	30 912	61 398
16. Padang Panjang	26 202	26 220	52 422
17. Bukittinggi	61 588	65 216	126 804
18. Payakumbuh	165 511	66 308	131 819
19. Pariaman	42 771	43 847	86 618

Penduduk Miskin

Konsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.3. Persentase Kemiskinan Sumbar dan Indonesia Tahun 2012-2017

Tahun	Kemiskinan (%)			
	Sumbar		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	8,19	8,00	11,96	11,66
2013	8,14	7,56	11,37	11,47
2014	7,41	6,89	11,25	10,96
2015	7,31	6,71	11,22	11,13
2016	7,09	7,14	10,86	10,70
2017	6,87	6,75	10,64	10,12

Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Miskin Sumbar dan Indonesia Bulan Maret dan September Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah penduduk miskin			
	Sumbar (ribuan orang)		Indonesia (juta orang)	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	407,95	401,52	29,13	28,59
2013	411,12	384,08	28,07	28,55
2014	379,20	354,74	28,28	27,73
2015	379,61	349,53	28,59	28,51
2016	371,56	376,51	28,01	27,76
2017	364,51	359,99	27,77	26,58

Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.5. Garis Kemiskinan Sumbar dan Indonesia, 2012-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)			
	Sumbar		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	277.784	292.052	248.707	259.520
2013	305.502	336.606	271.626	292.951
2014	349.656	365.827	302.735	312.328
2015	384.277	403.947	330.776	344.809
2016	425.141	438.075	354.386	361.990
2017	453.612	455.797	374.478	387.160

Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sumatera Barat, 2014-2017

Tahun	Bulan	P1 (%)			P2 (%)		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2014	Maret	0,65	1,12	0,94	0,13	0,28	0,22
	September	0,54	0,89	0,75	0,10	0,18	0,15
2015	Maret	0,79	1,10	0,98	0,224	0,211	0,161
	September	1,06	1,39	1,26	0,25	0,32	0,29
2016	Maret	0,752	1,334	1,096	0,153	0,304	0,242
	September	1,038	1,180	1,122	0,249	0,299	0,278
2017	Maret	0,752	1,175	1,000	0,157	0,278	0,228
	September	0,6	1,27	0,99	0,11	0,32	0,23

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin , P1, P2 dan Garis Kabupten/Kota Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016

Kab/Kota	Penduduk Miskin (000) orang	Persentase Penduduk Miskin	P1 (Indeks Kedalaman)	P2 (Indeks Keparahan)	Garis Kemiskinan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Mentawai	13,09	15,12	2,56	0,60	263 793
02. Pesisir Selatan	35,86	7,92	1,17	0,27	366 228
03. Kab. Solok	34,06	9,32	1,19	0,25	376 748
04. Sijunjung	17,12	7,6	1,25	0,28	344 153
05. Tanah Datar	19,63	5,68	0,81	0,15	346 267
06. Padang Pariaman	36,34	8,91	1,36	0,38	374 636
07. A g a m	37,55	7,83	0,96	0,19	315 804
08. Lima Puluh Kota	28,57	7,59	1,06	0,21	357 824
09. P a s a m a n	20,83	7,65	0,42	0,05	307 552
10. Solok Selatan	11,91	7,35	1,23	0,31	326 733
11. Dharmasraya	16,24	7,16	1,21	0,3	374 642
12. Pasaman Barat	30,76	7,4	1,09	0,23	367 159

Lanjutan Tabel 3.7.

Kab/Kota	Penduduk Miskin (000) orang	Persentase Penduduk Miskin	P1 (Indeks Kedalaman)	P2 (Indeks Keparahan)	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71. Padang	42,56	4,68	0,55	0,11	449 658
72. Kota Solok	2,59	3,86	0,13	0,01	385 781
73. Sawahlunto	1,34	2,21	0,12	0,01	318 721
74. Padang Panjang	3,47	6,75	0,66	0,11	420 981
75. Bukittinggi	6,81	5,48	1,05	0,3	420 478
76. Payakumbuh	8,35	6,46	0,87	0,19	424 233
77. Pariaman	4,47	5,23	0,90	0,22	392 970
Sumatera Barat	371,55	7,09	1,10	0,24	425 141

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Interpretasi

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 3.8. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Barat, 2011-2017

Tahun	Gini Ratio			
	Sumbar		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	0,35	0,33	0,41	0,39
2012	0,36	0,35	0,41	0,41
2013	0,36	0,34	0,41	0,41
2014	0,33	0,32	0,41	0,41
2015	0,34	0,32	0,41	0,40
2016	0,33	0,31	0,40	0,39
2017	0,32	0,31	0,39	0,39

Tabel 3.9. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Gini Ratio
(1)	(2)
01. Kab. Kep. Mentawai	0,31
02. Kab. Pesisir Selatan	0,27
03. Kab. Solok	0,31
04. Kab. Sijunjung	0,33
05. Kab. Tanah Datar	0,30
06. Kab. Padang Pariaman	0,26
07. Kab. Agam	0,29
08. Kab. Lima Puluh Kota	0,27
09. Kab. Pasaman	0,30
10. Kab. Solok Selatan	0,31
11. Kab. Dharmasraya	0,30
12. Kab. Pasaman Barat	0,31

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.9

Kab/Kota	Gini Ratio
(1)	(2)
13. Kota Padang	0,35
14. Kota Solok	0,34
15. Kota Sawahlunto	0,32
16. Kota Padang Panjang	0,38
17. Kota Bukittinggi	0,33
18. Kota Payakumbuh	0,34
19. Kota Pariaman	0,34
Sumatera Barat	0,312

Sumber : Susenas September 2016

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Tabel 3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumbar dan Indonesia, 2012-2017

Tahun	TPAK (%)			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	69,98	64,50	69,59	67,76
2013	70,33	62,92	69,15	66,77
2014	70,58	65,19	69,17	66,60
2015	68,73	64,56	69,50	65,76
2016	70,34	67,08	68,06	66,34
2017	70,42	66,29	69,02	66,67

Tabel 3.11. Persentase Penduduk Bekerja Sumbar dan Indonesia, 2012-2017

Tahun	Penduduk Bekerja (%)			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	65,50	60,25	65,15	63,61
2013	65,86	58,50	65,08	62,66
2014	66,12	60,95	65,23	62,64
2015	64,61	60,11	65,46	61,70
2016	66,25	63,66	64,31	62,62
2017	66,34	62,59	65,34	63,01

Tabel 3.12. Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia, 2012-2017

Tahun	Penduduk Bukan Angkatan Kerja (%)			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	30,02	35,50	30,41	32,24
2013	29,67	37,08	30,85	33,23
2014	29,42	34,81	30,83	33,40
2015	31,27	35,44	30,50	34,24
2016	29,66	32,92	31,94	33,66
2017	29,58	33,71	30,98	33,33

**Tabel 3.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke-atas
Sumbar dan Indonesia, 2012-2017**

Tahun	Penduduk 15 tahun + (orang)			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	3.453.844	3.476.504	175.065.229	176.873.832
2013	3.500.321	3.523.167	178.130.470	179.967.361
2014	3.545.970	3.577.219	181.169.972	182.992.204
2015	3.609.544	3.634.236	184.599.615	186.100.917
2016	3.663.833	3.688.126	187.600.634	189.096.722
2017	3.717.416	3.746.830	190.587.918	192.079.416

Tabel 3.14. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia (orang), 2012-2017

Tahun	Penduduk Angkatan Kerja			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	2.417.029	2.242.492	121.819.813	119.849.734
2013	2.461.696	2.216.687	123.170.509	120.172.003
2014	2.502.702	2.331.993	125.316.991	121.872.931
2015	2.480.828	2.346.163	128.301.588	122.380.021
2016	2.577.041	2.473.814	127.671.869	125.443.748
2017	2.617.874	2.483.675	131.544.111	128.062.746

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

$$\text{TPT} = \text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%$$

TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk.

Penganggur terbuka

terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3.15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar dan Indonesia, 2012-2017

Tahun	TPT (%)			
	Sumbar		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	6,41	6,60	6,37	6,13
2013	6,35	7,02	5,88	6,17
2014	6,32	6,50	5,70	5,94
2015	5,99	6,89	5,81	6,18
2016	5,81	5,09	5,50	5,61
2017	5,80	5,58	5,33	5,50

**Tabel 3.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/
Kota di Sumatera Barat, 2015 dan 2017**

Kabupaten/Kota	TPT (%)	
	2015	2017
1. Kab.Kep.Mentawai	1,25	1,96
2. Kab.Pesisir Selatan	11,69	5,95
3. Kab.Solok	3,97	6,05
4. Kab.Sijunjung	4,26	3,32
5. Kab.Tanah Datar	4,46	3,72
6. Kab.Padang Pariaman	5,80	6,65
7. Kab.Agam	6,05	4,23
8. Kab.Lima Puluh Kota	3,78	2,60
9. Kab.Pasaman	5,06	6,81

Catatan : Angka TPT tahun 2016 untuk Kabupaten/Kota tidak ada karena sampel Survei Sakernas Tahun 2016 tidak mencukupi untuk estimasi Kabupaten/Kota

Lanjutan Tabel 3.16

Kabupaten/Kota	TPT (%)	
	2015	2017
10. Kab.Solok Selatan	6,30	5,54
11. Kab.Dharmasraya	3,51	3,69
12. Kab.Pasaman Barat	3,79	3,99
13. Kota Padang	14,00	9,44
14. Kota Solok	4,72	5,88
15. Kota Sawahlunto	7,18	6,19
16. Kota Padang Panjang	6,33	5,43
17. Kota Bukittinggi	6,04	6,94
18. Kota Payakumbuh	7,07	3,45
19. Kota Pariaman	6,61	5,97
Sumatera Barat	6,89	5,58

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 3.17. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Barat Tahun 2016 -2017

Jenjang Pendidikan	APM (%)		APK (%)	
	2016	2017	2016	2017
SD/MI/Sederajat	98,23	98,64	110,39	110,44
SMP/MTs/Sederajat	76,19	76,47	90,36	90,09
SMA/SMK/MA/Sederajat	67,12	67,30	73,96	76,96

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Misal :

APM SD = Jumlah murid SD atau sederajat usia 7-12 Tahun/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

APK SD = Jumlah murid SD atau sederajat/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

APS 7-12 Tahun = Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

Tabel 3.18. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APM (%)			APK (%)		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1. Kab.Kep.Mentawai	98,82	61,10	42,89	116,95	85,44	57,14
2. Kab.Pesisir Selatan	100,00	81,01	72,55	112,09	88,81	79,18
3. Kab.Solok	98,75	78,95	56,10	114,19	90,19	61,81
4. Kab.Sijunjung	99,65	70,22	55,42	111,49	83,47	59,02
5. Kab.Tanah Datar	98,31	72,80	68,50	111,03	95,48	79,36
6. Kab.Padang Pariaman	99,87	73,30	71,01	111,27	84,08	87,08
7. Kab.Agam	98,61	78,11	67,72	111,90	95,03	72,72
8. Kab.Lima Puluh Kota	97,62	72,54	71,09	110,34	85,57	80,85
9. Kab.Pasaman	99,65	67,61	52,13	112,42	87,20	60,32

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.18

Kabupaten/Kota	APM (%)			APK (%)		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
10. Kab.Solok Selatan	99,46	76,32	67,31	116,30	81,43	73,77
11. Kab.Dharmasraya	98,87	73,88	56,77	110,44	81,36	61,90
12. Kab.Pasaman Barat	99,02	83,55	68,09	113,13	89,00	70,71
13. Kota Padang	96,06	80,00	74,24	102,94	101,11	89,72
14. Kota Solok	100,00	73,83	71,22	110,43	81,03	87,36
15. Kota Sawahlunto	99,71	86,84	72,25	104,81	95,22	83,34
16. Kota Padang Panjang	99,07	78,57	77,25	105,73	86,95	91,39
17. Kota Bukittinggi	99,46	79,22	79,06	107,34	87,71	87,55
18. Kota Payakumbuh	99,19	69,33	68,74	109,17	85,63	85,82
19. Kota Pariaman	100,00	72,11	71,27	111,23	86,25	86,91
Sumatera Barat	98,64	76,47	67,30	110,44	90,09	76,96

Tabel 3.19. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APS (%)		
	Umur 7-12 th	Umur 13-15 th	Umur 16-18 th
1. Kab.Kep.Mentawai	98,82	97,57	78,65
2. Kab.Pesisir Selatan	100,00	96,15	84,90
3. Kab.Solok	98,75	96,38	71,18
4. Kab.Sijunjung	99,65	90,04	75,37
5. Kab.Tanah Datar	99,50	94,97	88,67
6. Kab.Padang Pariaman	99,87	98,30	85,81
7. Kab.Agam	99,79	96,29	84,58
8. Kab.Lima Puluh Kota	98,88	95,59	82,30
9. Kab.Pasaman	99,65	95,19	70,26

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.19

Kabupaten/Kota	APS (%)		
	Umur 7-12 th	Umur 13-15 th	Umur 16-18 th
10. Kab.Solok Selatan	99,46	98,60	73,46
11. Kab.Dharmasraya	98,70	96,32	64,28
12. Kab.Pasaman Barat	99,02	95,62	73,16
13. Kota Padang	99,84	96,90	94,51
14. Kota Solok	100,00	96,81	82,45
15. Kota Sawahlunto	99,53	98,00	84,42
16. Kota Padang Panjang	99,07	95,24	91,58
17. Kota Bukittinggi	99,46	97,62	87,37
18. Kota Payakumbuh	99,07	97,81	88,23
19. Kota Pariaman	100,00	96,70	89,81
Sumatera Barat	99,48	96,25	82,59

Tabel 3.20. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016

Indeks	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Indeks Pembangunan TIK	3,86	4,24

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.

IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan TIK suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum, sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah masih belum optimum.

Tabel 3.21. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat, 2009-2016

Indeks	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IDI Sumatera Barat	60,29	63,04	65,02	60,82	54,11	63,99	67,46	54,41

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,82. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Tabel 3.22. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, 2012-2017

Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dasar
(1)	(2)	(3)
2012	1 150 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 840-479-2011 Tanggal 26 Oktober 2011”
2013	1 350 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-781-2012 Tanggal 6 November 2012”
2014	1 490 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-846-2013 Tanggal 29 Oktober 2013”
2015	1 615 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-802-2014 Tanggal 27 Oktober 2014”
2016	1 800 725,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-777-2015 Tanggal 30 Oktober 2015”
2017	1 949 284,81	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-1178-2016 Tanggal 28 Oktober 2016”

<https://sumbar.biz>



PRODUKSI



- Padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang
- Bentuk produksi padi adalah gabah kering giling
- Sumber data yang utama digunakan dalam pengumpulan data tanaman pangan di Indonesia adalah melalui kegiatan Survei Pertanian (SP) and Survei Ubinan.
- Produksi padi adalah hasil kali dari luas panen dan produktivitas.
- Sumber data yang utama digunakan dalam pengumpulan data tanaman pangan di Indonesia adalah melalui kegiatan Survei Pertanian (SP) and Survei Ubinan.

Tabel 4.1. Jumlah Produksi Padi menurut Kab/kota di Sumatera Barat(ton)

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)			
	2013	2014	2015	2016
1. Kab.Kep.Mentawai	1 022,00	2 106,00	3 036,00	2 477,00
2. Kab.Pesisir Selatan	272 495,00	312 872,00	317 573,00	274 119,00
3. Kab.Solok	332 455,00	326 641,00	307 999,00	330 082,00
4. Kab.Sijunjung	80 229,00	83 357,00	88 338,00	90 209,00
5. Kab.Tanah Datar	251 341,00	237 610,00	245 196,00	235 636,00
6. Kab.Padang Pariaman	264 818,00	268 980,00	278 127,00	287 046,00
7. Kab.Agam	306 410,00	322 618,00	326 891,00	372 414,00
8. Kab.Lima Puluh Kota	222 463,00	217 366,00	227 184,00	226 170,00
9. Kab.Pasaman	203 558,00	214 784,00	216 766,00	191 282,00

SE2016 secara khusus memotret skala usaha yang diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Sebuah usaha atau perusahaan dianggap UMB dengan mempertimbangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan kriteria sektoral lainnya serta threshold yang tertuang dalam Undang-undang no 20 Tahun 2008.

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

Kriteria umum penentuan skala usaha berdasarkan badan hukum adalah seluruh usaha yang berbadan hukum mayoritas dikategorikan sebagai Usaha Menengah dan Besar (UMB) kecuali Kategori Industri yang hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja.

Penentuan skala usaha berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. Usaha Menengah:

kekayaan bersih > 500 juta s/d 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau Omset/tahun > 2,5 miliar s/d 50 miliar rupiah.

b. Usaha Besar : diatas usaha menengah.

Lanjutan Tabel 4.1

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)			
	2013	2014	2015	2016
10. Kab.Solok Selatan	127 244,00	133 097,00	136 363,00	118 530,00
11. Kab.Dharmasraya	54 940,00	62 093,00	57 356,00	59 282,00
12. Kab.Pasaman Barat	122 128,00	141 818,00	147 528,00	121 217,00
13. Kota Padang	86 580,00	90 064,00	88 753,00	82 620,00
14. Kota Solok	11 225,00	12 725,00	11 756,00	13 290,00
15. Kota Sawahlunto	17 536,00	15 076,00	16 657,00	15 055,00
16. Kota Padang Panjang	8 630,00	8 074,00	9 481,00	10 347,00
17. Kota Bukittinggi	4 411,00	5 053,00	5 096,00	5 227,00
18. Kota Payakumbuh	33 123,00	33 427,00	34 416,00	37 402,00
19. Kota Pariaman	29 776,00	31 259,00	32 093,00	31 047,00
Sumatera Barat	2 430 384,00	2 519 020,00	2 550 609,00	2 503 452,00

Kriteria khusus berdasarkan kategori

Industri

- Usaha Menengah : Jumlah Tenaga Kerja 20-99 orang
- Usaha Besar : Jumlah Tenaga Kerja \geq 100 orang

Konstruksi

- Usaha Menengah : kualifikasi M1 & M2
- Usaha Besar : kualifikasi B1 & B2
- Kualifikasi M1, M2, B1 dan B2 mengacu pada Peraturan Nomor 10 Tahun 2014 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Hotel

- UMB merupakan hotel berbintang 1 s.d. 5

Tabel 4.2. Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil SE2016 menurut Kategori dan Lokasi Usaha (usaha)

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
B. Pertambangan dan penggalian	110	6.397	6.507
C. Industri Pengolahan	22.908	64.485	87.393
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	325	439	764
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	200	899	1.099
F. Konstruksi	741	5.125	5.866
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	116.582	153.199	269.781
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.337	24.668	26.005

Lanjutan Tabel 4.2.

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	39.786	74.834	114.620
J. Informasi Dan Komunikasi	4.538	9.224	13.762
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	3.276	903	4.179
L. Real Estat	370	11.985	12.355
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3.698	5.701	9.399
P. Pendidikan	13.908	1.924	15.832

bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2.

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	2.826	4.855	7.681
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	7.114	10.724	17.838
Jumlah	217.719	375.362	593.081

Tabel 4.3. Persentase Jumlah Usaha Hasil SE2016 menurut Kategori

Kategori	Persentase
B. Pertambangan dan penggalian	1,10
C. Industri Pengolahan	14,74
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,13
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,19
F. Konstruksi	0,99
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45,49
H. Pengangkutan dan pergudangan	4,38
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	19,33
J. Informasi Dan Komunikasi	2,32
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,70

bersambung...

Lanjutan Tabel 4.3.

Kategori	Persentase
L. Real Estat	2,08
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1,58
P. Pendidikan	2,67
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,30
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	3,01
Jumlah	100,00

Tabel 4.4. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (usaha)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
B.Pertambangan dan penggalian	6.418	89	6.507
C. Industri Pengolahan	87.165	228	87.393
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	662	102	764
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.017	82	1.099
F. Konstruksi	5.462	404	5.866
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	65.645	4.136	269.781
H. Pengangkutan dan pergudangan	25.519	486	26.005

bersambung...

Lanjutan Tabel 4.4.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	114.366	254	114.620
J. Informasi Dan Komunikasi	13.460	302	13.762
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	2.907	1.272	4.179
L. Real Estat	12.252	103	12.355
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	8.906	493	9.399
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya			
P. Pendidikan	15.625	207	15.832

Lanjutan Tabel 4.4.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	7.605	76	7.681
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	17.772	66	17.838
Jumlah	584.781	8.300	593.081

Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (orang)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
B. Pertambangan dan penggalian	13.957	6.056	20.013
C. Industri Pengolahan	156.146	30.589	186.735
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.247	4.171	5.418
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.707	2.298	4.005
F. Konstruksi	53.795	13.681	67.476
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	387.979	34.025	422.004
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.707	2.298	4.005

Lanjutan Tabel 4.5.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	177.110	5.934	183.044
J. Informasi Dan Komunikasi	17.196	3.075	20.271
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15.569	23.450	39.019
L. Real Estat	13.570	807	14.377
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	21.000	23.450	39.019
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya			
P. Pendidikan	145.072	14.753	159.825
JUMLAH	1.084.254	165.079	1.249.333

Tabel 4.6. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota (usaha)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
[01] KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4.681	71	4.752
[02] KAB. PESISIR SELATAN	43.076	355	43.431
[03] KAB. SOLOK	37.602	364	37.966
[04] KAB. SIJUNJUNG	29.105	198	29.303
[05] KAB. TANAH DATAR	45.546	345	45.891
[06] KAB. PADANG PARIAMAN	43.591	375	43.966
[07] KAB. AGAM	56.323	400	56.723
[08] KAB. LIMA PULUH KOTA	47.612	304	47.916
[09] KAB. PASAMAN	26.077	190	26.267
[10] KAB. SOLOK SELATAN	15.936	106	16.042

bersambung...

Lanjutan Tabel 4.6.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
[11] KAB. DHARMASRAYA	22.618	310	22.928
[12] KAB. PASAMAN BARAT	38.764	446	39.210
[13] KOTA PADANG	90.616	3.036	93.652
[14] KOTA SOLOK	9.870	240	10.110
[15] KOTA SAWAH LUNTO	8.792	101	8.893
[16] KOTA PADANG PANJANG	9.260	180	9.440
[17] KOTA BUKITTINGGI	22.794	629	23.423
[18] KOTA PAYAKUMBUH	19.279	448	19.727
[19] KOTA PARIAMAN	13.239	202	13.441
SUMATERA BARAT	584.781	8.300	593.081

Tabel 4.7. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota di Sumatera Barat (orang)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
[01] KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	11.726	751	12.477
[02] KAB. PESISIR SELATAN	82.354	4.698	87.052
[03] KAB. SOLOK	67.244	3.705	70.949
[04] KAB. SIJUNJUNG	50.521	3.568	54.089
[05] KAB. TANAH DATAR	79.701	3.982	83.683
[06] KAB. PADANG PARIAMAN	78.145	8.144	86.289
[07] KAB. AGAM	96.615	6.460	103.075
[08] KAB. LIMA PULUH KOTA	79.529	2.505	82.034
[09] KAB. PASAMAN	48.110	2.770	50.880
[10] KAB. SOLOK SELATAN	31.414	4.017	35.431

Lanjutan Tabel 4.7.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
[11] KAB. DHARMASRAYA	42.464	4.828	47.292
[12] KAB. PASAMAN BARAT	70.587	6.696	77.283
[13] KOTA PADANG	179.677	81.469	261.146
[14] KOTA SOLOK	19.844	4.652	24.496
[15] KOTA SAWAH LUNTO	15.941	4.529	20.470
[16] KOTA PADANG PANJANG	18.221	2.750	20.971
[17] KOTA BUKITTINGGI	46.371	10.101	56.472
[18] KOTA PAYAKUMBUH	39.008	5.920	44.928
[19] KOTA PARIAMAN	26.782	3.534	30.316
SUMATERA BARAT	1.084.254	165.079	1.249.333



IPDS

<https://sumbar.br>

Tabel 5.1. Rekap Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2017

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECA- MATAN	JUMLAH DESA/NAGARI			Jorong	Dusun	RT
		URBAN	RURAL	TOTAL			
1. Kab. Kepulauan Mentawai	10	2	41	43	-	341	-
2. Kab. Pesisir Selatan	15	11	171	182	480	-	-
3. Kab. Solok	14	2	72	74	414	-	-
4. Kab. Sijunjung	8	3	59	62	285	-	-
5. Kab. Tanah Datar	14	10	65	75	395	-	-
6. Kab. Padang Pariaman	17	17	43	60	445	-	-

bersambung...

Lanjutan Tabel 5.1.

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECA- MATAN	JUMLAH DESA/NAGARI			Jorong	Dusun	RT
		URBAN	RURAL	TOTAL			
7. Kab. Agam	16	19	63	82	477	-	-
8. Kab. Lima Puluh Kota	13	4	75	79	410	-	-
9. Kab. Pasaman	12	4	33	37	225	-	-
10. Kab. Solok Selatan	7	6	33	39	269	-	-
11. Kab. Dharmasraya	11	14	38	52	263	-	-
12. Kab. Pasaman Barat	11	2	17	19	212	-	-

bersambung...

Lanjutan Tabel 5.1

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECA- MATAN	JUMLAH DESA/NAGARI			JORONG	DUSUN	RT
		URBAN	RURAL	TOTAL			
13. Kota Padang	11	95	9	104	-	-	3 384
14. Kota Solok	2	12	1	13	-	-	137
15. Kota Sawah Lunto	4	20	17	37	-	107	64
16. Kota Padang Panjang	2	14	2	16	-	-	215
17. Kota Bukittinggi	3	24	0	24	-	-	338
18. Kota Payakumbuh	5	34	14	48	-	-	475
19. Kota Pariaman	4	51	20	71	-	168	83
TOTAL	179	344	773	1 117	0	275	4 696

Tabel 5.2. Luas Wilayah Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)
1. Kab.Kep.Mentawai	6011,35
2. Kab.Pesisir Selatan	5794,95
3. Kab.Solok	3738,00
4. Kab.Sijunjung	3130,80
5. Kab.Tanah Datar	1336,00
6. Kab.Padang Pariaman	1328,79
7. Kab.Agam	2232,30
8. Kab.Lima Puluh Kota	3354,30
9. Kab.Pasaman	4447,63

bersambung...

Lanjutan Tabel 5.2

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)
10. Kab.Solok Selatan	3346,20
11. Kab.Dharmasraya	2961,13
12. Kab.Pasaman Barat	3387,77
13. Kota Padang	694,96
14. Kota Solok	57,64
15. Kota Sawahlunto	273,45
16. Kota Padang Panjang	23,00
17. Kota Bukittinggi	25,24
18. Kota Payakumbuh	80,43
19. Kota Pariaman	73,36

DATA

Mencerdaskan Bangsa



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT***

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang

Telp. (0751) 422158

website: sumbar.bps.go.id

ISBN: 978-602-6544-28-5



9 786026 344285